



Strategi Penurunan Angka Stunting dan Analisis Hambatan Kebijakan

Stunting Reduction Strategies and Policy Barrier Analysis

Wynne Frederica^a, Laila Khalid Al-Firdaus^a, Fitriyah^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

* *Correspondence:* chafrederica89@gmail.com

Abstract

Stunting has been proven to be a global issue that significantly impacts the growth of a country. In Indonesia, the problem of stunting has become one of the Strategic Priority Projects (Major Projects) in the National Medium-Term Development Plan 2022-2024. Based on this decision, each regents, including Kendal Regency, has also been promoting the acceleration of stunting reduction. Various medical studies have extensively discussed the dangers, factors, and the actions that can be undertaken to prevent stunting. However, they have yet to elaborate on the actual obstacles faced by local governments in their efforts to create stunting-free regions. The purpose of this study is to identify strategies for reducing stunting and the factors that may hinder the achievement of stunting reduction targets. In collecting research data, the author uses a qualitative descriptive method obtained from literature reviews, observations, and interviews involving relevant stakeholders.

Keywords: stunting, policy barriers, stunting in kendal district

Abstrak

Stunting telah terbukti menjadi permasalahan global yang sangat berdampak pada pertumbuhan suatu negara, di Indonesia sendiri permasalahan stunting menjadi salah satu Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2022-2024, Berdasarkan Keputusan itu di tiap kabupaten termasuk di Kabupaten Kendal Percepatan Penurunan stunting juga di galakan. Banyak dijelaskan dalam berbagai penelitian medis banyak penelitian yang membahas tentang bahaya, factor-faktor dan Upaya yang dapat di lakukan untuk mencegah stunting, namun sejauh ini mereka belum menjabarkan hambatan yang sebenarnya di hadapi Pemerintah Daerah dalam upayanya mewujudkan daerah yang bebas stunting. Tujuan dari penelitian ini. Untuk mengidentifikasi strategi oenurunan stunting dan factor yang dapat menghambat pencapaian target penurunan angka stunting. Dalam pengambilan data penilitan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang di dapat dari kajian literatur, observasi dan wawancara melibat kan stakeholder terkait.

Kata kunci: stunting, hambatan kebijakan, stunting kabupaten kendal

I. Pendahuluan

Stunting merupakan suatu keadaan di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata untuk usianya karena kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada ibu selama kehamilan atau pada saat anak sedang dalam masa pertumbuhan, stunting biasanya baru nampak saat anak berusia dua tahun (Kemenkes RI, 2016). Sebagai sebuah permasalahan gizi kronis yang dapat mengganggu pertumbuhan pada anak, stunting menjadi isu penting secara global. Stunting menjadi permasalahan serius yang menyangkut kesehatan masyarakat di banyak negara karena dapat mengancam masa depan suatu bangsa jika tidak tertangani dengan baik, karena menyangkut peningkatan resiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental (Lewit, 1997; Unicef, 2013).

Terlebih lagi studi menunjukkan anak-anak yang terindikasi stunting mengalami penurunan prestasi akademik (Picauly & Toy, 2013), meningkatnya resiko obesitas (Hoffman at al, 2000), rentan terhadap segala jenis penyakit tidak menular (unicef Indonesia, 2013) dan meningkatnya resiko penyakit degeneratif (Picauly & Toy, 2013, WHO, 2013). Stunting tidak hanya dialami keluarga miskin, namun juga mereka yang berstatus keluarga mampu atau berada. Stunting tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik, namun juga mengganggu perkembangan otak. Penyebab masih tingginya angka stunting di Indonesia sangat kompleks. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi pada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan asupan gizi dan

kebersihan diri pada ibu hamil dan anak di bawah usia dua tahun. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi seimbang serta pemberian ASI yang kurang tepat.

Dalam dunia psikologi terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan anak-anak dengan indikasi stunting di 1000 hari pertama mengalami gangguan psikologi saat memasuki masa remaja seperti gejala depresi, tingkat kecemasan yang tinggi, memiliki harga diri (*self esteem*) yang rendah bila dibandingkan dengan remaja yang tidak terhambat pertumbuhannya. Regulasi emosi dan perilaku di akhir masa remaja juga cenderung lebih buruk pada anak-anak yang terindikasi stunting di 2 tahun pertama masa hidupnya (Walker et al 2007). Bisa dibayangkan bahaya stunting apabila tidak segera diatasi.

Secara global, pada tahun 2010 prevalensi anak pendek sebesar 171 juta anak-anak di mana 167 juta kejadian terjadi di negara berkembang. Prevalensi stunting pada anak menurun dari 39,7% pada tahun 1990 menjadi 26,7% pada tahun 2010. Tren ini diperkirakan akan mencapai 21,8% atau 142 juta pada tahun 2020 (Onis et al, 2011). Prevalensi stunting di Afrika mengalami stagnasi sejak tahun 1990 sekitar 40%, sementara di Asia menunjukkan penurunan dramatis dari 49% pada tahun 1990 menjadi 28% pada tahun 2010 (Onis et al, 2011). Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit di Bangladesh dapat menurunkan prevalensi stunting pada anak-anak yang berusia 24-59 bulan dari 63,1% menjadi 50,4% (yaitu pengurangan absolut 13% atau pengurangan relatif rata-rata 4,5% per tahun (Unicef, 2013). Pengurangan stunting juga telah didokumentasikan di beberapa negara di Amerika Selatan. Prevalensi stunting di Brazil menurun dari 37% pada tahun 1974-1975 menjadi 7% pada tahun 2006-2007, dengan kata lain adanya pengurangan relatif rata-rata 5,2% per tahun selama 32 tahun (Unicef, 2013). Di Meksiko prevalensi stunting menurun dari 27% pada tahun 1988 menjadi 16% pada tahun 2006 (pengurangan absolut 11% atau relatif rata-rata pengurangan 2,9% per tahun). Studi observasional di sembilan negara Sub Sahara Afrika pada anak-anak pada anak-anak yang berusia di bawah dua tahun menunjukkan bahwa prevalensi stunting turun 43% dalam tiga tahun pelaksanaan program Scaling Up Nutrition (SUN) (Unicef, 2013).

Persoalan stunting tidak bisa dipandang sepele, sebab anak dengan kondisi stunting cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan dapat menyebabkan kerugian yang serius bagi negara. Di Indonesia sendiri, stunting telah menjadi permasalahan penting dan mendapatkan perhatian yang luar biasa dari pemerintah. Stunting menjadi salah satu Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2022-2024 yang ditargetkan untuk menurunkan prevalensi hingga 14%. Keseriusan pemerintah dalam upaya menurunkan prevalensi stunting diwujudkan dalam beberapa regulasi dan peraturan, seperti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting hingga peraturan-peraturan turunan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait, yakni Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia hingga Pemerintah Daerah di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kebijakan Penurunan Stunting harus menjadi perhatian seluruh stakeholder dan pemerintah di seluruh tingkatan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta. Dalam Peraturan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, telah diatur tentang regulasi penurunan stunting di Indonesia, regulasi ini dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1-4:

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
- (2) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
 - b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
 - e. audit kasus Stunting.

- (4) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Mengutip dari Laporan World Health Organization (WHO) berjudul *Reducing Stunting in Children* mengemukakan bahwa penurunan stunting mampu diatasi dengan keterlibatan berbagai stakeholder (kesehatan, sosial, agrikultur, pendidikan dan pemerintah). Statement WHO ini menunjukkan bahwa proses penurunan stunting ini merupakan tantangan luar biasa yang hanya bisa diatasi atas keterlibatan banyak stakeholder. Peran pemerintah dan swasta dalam upaya menurunkan stunting terlebih kebijakan pemerintah dalam melakukan keputusan untuk menekankan penurunan stunting sangat berdampak besar, selain itu pemerintah juga harus fokus memonitori dan mengevaluasi program-program penurunan stunting. Swasta juga sangat dibutuhkan sebagai penyalur dan membantu dalam mempromosikan program-program pemerintah dan fokus memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum.

Sayangnya, masih ditemukan banyak Pemerintah Daerah yang tidak serius dalam melakukan Keputusan terkait upaya penurunan stunting. Presiden Joko Widodo sempat menyoroti anggaran di salah satu Pemerintah Daerah untuk penanganan stunting banyak digunakan untuk perjalanan dinas. “Ada anggaran stunting Rp 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa Rp 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran Rp 10 miliar. Coba dilihat detail, baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp 10 miliar untuk stunting. Cek perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar, yang untuk benar-bener beli telur itu ga ada Rp 2 miliar. Kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini,” sentil Presiden Joko Widodo dalam Sambutannya pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah pada 14 Juni 2023. Peringatan dari Presiden Joko Widodo nampaknya menjadi tamparan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah harusnya lebih fokus kepada upaya dan langkah konkret yang menyentuh kepada sasaran masyarakat secara langsung.

Kondisi penurunan stunting di Indonesia juga belum membuahkan hasil yang signifikan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting nasional pada tahun 2022 sebesar 21,6 persen atau dari tahun 2021 sebesar 24,4%. Penurunan tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah yakni 14% pada tahun 2024. Padahal secara nasional telah diterbitkan Peraturan Presiden yang diharapkan mengakselerasi pencapaian target penurunan stunting. Tetapi, ternyata sampai 2 tahun setelah keluarnya Perpres, masih belum ada progress yang berarti. Untuk mencapai target 14 persen, maka pemerintah menargetkan untuk dapat menurunkan prevalensi stunting 3,8 persen per tahunnya sampai tahun 2024.

Sementara di Kabupaten Kendal, menurut data dari Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Kendal turun dari 21,3% menjadi 17%. Sementara menurut data e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGM) Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal pada Februari 2022, Angka Stunting di Kabupaten Kendal sebesar 7.892 Balita (13,3%) sedangkan pada Agustus 2022 sebesar 6.413 Balita (11,4%). Penanganan stunting di Kabupaten Kendal juga telah melibatkan berbagai sektor melalui program Aksi Konvergensi “Rembug Stunting” yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, NGO, Lembaga UN, masyarakat sipil, hingga sektor swasta.

Selain itu, sebagai salah satu bentuk dukungan dan komitmen seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Kendal, telah dilakukan kegiatan Rembug Stunting yang dihadiri seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, dunia bisnis, swasta, media massa, maupun kelompok masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan komitmen seluruh pihak menuju Kendal Zero Stunting. Kabupaten Kendal juga telah melaksanakan beberapa program unggulan Pemerintah Pusat dalam penanganan stunting, seperti Dapur Sehat Atasi Stunting dan Bapak Asuh Anak Stunting.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal juga telah menerbitkan regulasi penanganan stunting melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kendal, yang dimaksudkan sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat di Kabupaten Kendal. Dalam pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa tujuan peraturan tersebut untuk mempercepat pencegahan stunting pada anak usia di bawah dua tahun (baduta) dan menangani stunting pada anak usia bawah lima tahun (balita) di daerah di bawah 20% pada tahun 2024 melalui pelaksanaan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan Percepatan pencegahan stunting di

Daerah dilakukan dengan pelibatan secara multi sektor melalui sinkronisasi lintas program dan Lintas Sektor di tingkat Daerah (Pasal 4 ayat 1). Dalam hal ini, pemerintah daerah mengajak semua sektor di daerah untuk fokus dalam penurunan angka stunting di tingkat daerah melalui berbagai upaya kolaborasi dan sinergi. Dalam peraturan tersebut, juga terdapat sasaran perbaikan gizi dalam program penurunan stunting di Kabupaten Kendal, termasuk Ibu Hamil.

Langkah-langkah pencegahan stunting sejak dini juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, melalui Dinas Kesehatan bersama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal melaksanakan program Pemeriksaan Gratis Ibu Hamil KEK ke dokter spesialis obgyn bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Weleri dan Baznas Kendal untuk memitigasi melalui pemeriksaan awal terhadap kondisi bayi, sehingga dapat dilakukan pencegahan sejak dini. Program Pemberian Tablet Tambah Darah untuk Siswi Sekolah, serta Penimbangan Bayi Tanpa Pakaian untuk melihat angka pasti terhadap kondisi bayi.

Pengumpulan data dianggap sangat krusial dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Kendal, sehingga pada pengerjaannya pemerintah bekerja sama dengan posyandu dan puskesmas untuk bisa memberikan data real time sehingga semua stakeholder bisa mendapatkan akses ke penurunan stunting di Kabupaten Kendal. Sistem manajemen data stunting di kabupaten Kendal sendiri dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi yang diintegrasikan dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik yang diterapkan di daerah. Semua program dan data yang terkumpul untuk penurunan stunting di Kabupaten Kendal dimonitori dan evaluasi langsung oleh Bupati Kendal.

Sebagai salah satu permasalahan gizi, stunting menjadi isu yang sangat krusial bagi keluarga. Hal utamanya adalah terkait pemenuhan gizi dalam lingkup keluarga. Mengutip dari Taufiqurrahman (2009) dalam Penelitian Mitra, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKes Hang Tuah Pekanbaru, pemenuhan zat gizi yang adekuat sangat dibutuhkan untuk menghindari atau memperkecil risiko stunting. Hal yang tak kalah penting adalah kualitas dan kuantitas MP-ASI yang baik menjadi komponen sangat penting dalam makanan karena mengandung sumber gizi yang berperan dalam pertumbuhan linear.

Keluarga sangat berperan dalam menentukan status gizi pada balita, mengingat konsumsi makanan anak bergantung kepada bagaimana kematangan dan sumber daya orang tua dalam memahami makanan yang tinggi protein, calcium, vitamin A, dan zinc yang dapat memacu terhadap pertumbuhan badan anak, sehingga pola pertumbuhan normal pada anak dapat terkejar. Hal itu, tentu bergantung kepada pendidikan dan pengetahuan ibu dan ketersediaan bahan makanan di rumah tangga. Salah satu penelitian Riyadi, Hastuti, Damayanti, dan Murtalaksono (2011) yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Anak Balita Di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa rumah tangga dengan perilaku sadar gizi yang kurang baik berpeluang meningkatkan risiko kejadian stunting pada anak balita 1,22 kali dibandingkan dengan rumah tangga dengan perilaku kesadaran gizi baik. Dalam hal ini, Ibu memiliki peran sebagai gate keeper dalam menjaga konsumsi pangan dan status gizi rumah tangga yang dipengaruhi oleh pengetahuan gizi ibu, akses informasi gizi dan kesehatan, praktek gizi dan kesehatan ibu, serta alokasi pengeluaran pangan dan non pangan (Picauly & Magdalena, 2013).

Permasalahan kekurangan gizi biasanya diawali dengan perlambatan pertumbuhan janin pada saat fase kehamilan hamil yang biasa juga disebut IUGR (Intra Uterine Growth Retardation). Jika tidak ada perbaikan yang dilakukan, masalah IUGR dan BBLR akan terus berlanjut ke generasi berikutnya, sehingga terjadi masalah anak stunting secara intergenerasi. Gizi ibu dan status kesehatannya sangat penting sebagai faktor penentu terjadinya stunting. Seorang ibu yang mengalami kekurangan gizi memiliki risiko lebih tinggi melahirkan anak yang terhambat pertumbuhannya, yang pada gilirannya akan memperpetuasi lingkaran setan gizi dan kemiskinan.

Selain faktor-faktor tersebut, faktor balita yang tidak lagi mengkonsumsi ASI memiliki risiko dua kali lebih besar mengalami stunting dibandingkan balita yang masih mengkonsumsi ASI (Taufiqurrahman et al, 2009). Oleh sebab itu, himbuan mengenai Pemberian ASI Eksklusif yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjadi sangat penting untuk dipahami dan dipedomani oleh para orang tua yang memiliki anak di bawah usia dua tahun. Dalam peraturan tersebut, diatur secara jelas dan rinci terkait pembagian tugas antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan orang tua serta sanksi administratif bagi setiap stakeholder yang tidak melaksanakan peraturan tersebut.

Ada beberapa poin penting dalam peraturan pemerintah tersebut, diantaranya mengenai kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diwajibkan untuk melakukan inisiasi menyusui dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam; keharusan menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya; larangan tenaga kesehatan memberikan Susu Formula; pemberian Air Susu Ibu sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan dan diteruskan sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Meski demikian, penerapan pola pemberian makan terbaik dengan memberikan ASI Eksklusif kepada bayi sejak lahir hingga berusia 2 (dua) tahun belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan paparan tersebut, kondisi penurunan stunting di Indonesia belum mengalami penurunan yang signifikan. Padahal, secara anggaran maupun program, pemerintah telah memaksimalkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki. Keterlibatan berbagai sektor juga telah dilakukan. Artinya, terdapat kelambanan sistem dan kebijakan dalam penanganan stunting di Indonesia. Respon Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah pada 14 Juni 2023 tersebut menjadi pertanyaan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penanganan stunting di tingkat daerah. Dengan demikian penting sekali, untuk melihat lebih jauh apa yang menyebabkan kelambanan capaian target penurunan stunting di daerah Kabupaten Kendal.

Lebih lanjut, penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya kebijakan penurunan stunting terhadap angka stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kendal. Penelitian ini akan menguraikan secara komprehensif bagaimana strategi dalam implementasi kebijakan serta menganalisis hambatan dalam upaya penurunan stunting dalam hal penganggaran dan dampaknya terhadap penurunan stunting di Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kabupaten Kendal. Selain itu, dalam penelitian ini akan menjelaskan secara rinci program-program dan inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kendal yang ditargetkan mencapai 14% di tahun 2024.

II. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan, sumber data sekunder dapat berupa bahan pustaka, literatur, hasil penelitian sebelumnya, buku, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni pengkajian dokumen, observasi, dan wawancara. Setelah memperoleh data-data yang diperlukan, selanjutnya melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pada teknik analisis tersebut, permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta satu dengan lainnya yang selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

III. Pembahasan

Strategi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam Percepatan Penurunan Stunting

Pemerintah Kabupaten Kendal telah melakukan berbagai upaya dan strategi dalam penanganan dan percepatan penurunan stunting yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kendal pada Pasal 2 BAB III mengatur upaya yang harus dilakukan dalam Percepatan Pencegahan Stunting yakni dengan membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan Stunting. Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan Stunting terdiri dari Kelompok Kerja Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi; Kelompok Kerja Kesehatan; Kelompok Kerja Ketahanan Pangan; Kelompok Kerja Permukiman dan Air Bersih; dan Kelompok Kerja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 441.8/181/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Kendal. Selanjutnya, dalam melihat strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, peneliti menggunakan indikator yang diutarakan oleh Fried R David (dalam Eddy Yunus, 2016).

a. Perumusan Strategi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam Penanganan Stunting

Pemerintah Kabupaten Kendal telah merumuskan beberapa strategi dalam penanganan stunting terintegrasi. Perumusan strategi pencegahan stunting dimulai dari kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Kendal, isu stunting masuk dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

Isu stunting menjadi salah satu diantara beberapa isu kesehatan yang harus ditangani dengan target prevalensi di tahun 2026 sebesar 13,4%. Amanah yang tertuang dalam RPJMD menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja PD. **Perumusan Strategi dimulai dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Intervensi Anggaran Prioritas Program dan Kegiatan, Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Penetapan Desa/Lokus Stunting Kabupaten Kendal,**

b. Pelaksanaan Strategi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam Penanganan Stunting

Beberapa strategi yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan dan program selama 2021–2023, Strategi yang dilaksanakan melalui penguatan program dan kebijakan; pelaksanaan program-program turunan pusat seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Formula 100, dan Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting; Melakukan Inovasi Penanganan Stunting; Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif; Penyediaan Layanan Kesehatan Dasar; Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Kader dan Tenaga Kesehatan; Monitoring dan Evaluasi.

Analisis Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kendal

Identifikasi pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kendal dapat dianalisis menggunakan teori eksplorasi model implementasi kebijakan George Edward III, Marilee S. Grindle, dan Mazmanian & Sabatier dalam perspektif segitiga analisis kebijakan sebagai berikut:

a. Aktor Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen, aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan percepatan penanganan stunting di Kabupaten Kendal yakni Kepala Daerah; Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang); Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Diketahui bahwa aktos lintas sektor dalam penanganan stunting sudah mempunyai tugas dan perannya masing-masing, sehingga diharapkan dapat bekerja bersama-sama dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Capaian Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Kendal Tahun 2021

Berdasarkan wawancara, observasi, studi pustaka dan penelitian dokumen yang telah dilakukan oleh peneliti, Tahun 2021 - 2023, Pemerintah Kabupaten Kendal mendapatkan beberapa capaian terkait penanganan stunting di Kabupaten Kendal. Angka stunting di Kabupaten Kendal menurut survei Kementerian Kesehatan mengalami penurunan pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, mengalami kenaikan cukup signifikan.

Pada tahun 2021 Kabupaten Kendal ditetapkan sebagai Lokus Tambahan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi

Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022, sehingga pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Kendal menindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang diatur dalam Perbup nomor 42 tahun 2021, dengan adanya Tim tersebut Kabupaten Kendal Berhasil menurunkan angka stunting sebesar 3,7% pada tahun 2022, pada tahun ini kabupaten kendal juga menetapkan 37 desa Lokus stunting yang tertulis pada Peraturan Bupati Nomor: 441.8/298/2022 tentang Desa/Kelurahan Prioritas Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kendal Tahun 2022-2023.

Namun pada tahun 2022 Kendal kembali masuk dalam daftar Lokus stunting dalam Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023, berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia tahun 2023 kendal mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 4,9%, dapat kita lihat dari data ini walaupun kendal telah ditetapkan sebagai lokus namun masih banyak hambatan yang menyebabkan kabupaten kendal belum mampu mencapai target Pravelensi angka stunting yang ditetapkan Nasional

Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal juga menggunakan data *realtime* berupa laporan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang diambil langsung pada saat penimbangan bulanan. Target penurunan stunting yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menggunakan basis data e-PPGBM. Berbeda dengan indikator yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggunakan data survei.

Analisis Hambatan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam Penanganan Stunting

Sejalan dengan pendapat Gow dan Morss, yang mengungkapkan hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan dalam mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Peneliti menemukan di Kabupaten Kendal terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan penanganan stunting. Peneliti mengelompokkan hambatan-hambatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Kendal ke dalam dua kelompok hambatan:

a. Hambatan Internal dalam Penanganan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kendal

Gow dan Mors dalam "*Local Organizations and Rural Development: A Learning Approach to Policy and Practice*" (1988) mengungkapkan birokrasi dan koordinasi yang buruk antar tingkat pemerintahan dan aktor-aktor terkait dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, Birokrasi yang berbelit-belit sering kali menyebabkan keterlambatan dan ketidakefisienan, seperti halnya yang disampaikan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) setiap

"Semuanya berkepentingan, Baperlitbang, tentu saja berkepentingan, BPKAD berkepentingan karena penyediaan anggarannya kemudian teknis itu sudah barang tentu adalah dinas kesehatan. Kemudian dinas KB, Ibu. Terus tidak kalah pentingnya adalah di Dinas Kelautan, kemudian di Dinas Perikanan, karena ya itu tadi berkaitan pola makan dan lain sebagainya. Tambah satu lagi ibu, itu adalah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena apa? Nilai Nilai sentuhan wilayah wilayahnya itu ada di desa".

Namun dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Baperlitbang didapat bahwa Belum ada Inovasi maupun Program Percepatan Penurunan Stunting yang dicetuskan secara mandiri dan dilalukan secara serentak oleh Kabupaten kendal, sampai saat ini Kabupaten kendal hanya meneruskan program dan arahan yang diberikan dari pemerintah daerah maupun pusat, ini menjadi salah satu indikator yang memperlihatkan kurangnya perhatian dari Dinas, Selain itu pada tahun 2023 tepatnya setelah Kabupaten Kendal ditetapkan sebagai salah satu lokus nasional di Surat Keputusan BAPPENAS tentang Lokus Stunting, pada tahun tersebut Kabupaten Kendal sempat menetapkan Lokus stunting di 60 Desa hasil dari Rembug Stunting sayangnya tidak dibarengi dengan penguatan SK dari Kepala Daerah, Hal ini menjadi sebuah temuan, sejauh apa sebenarnya Pemerintah daerah memprioritaskan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kendal tapi di bisa dipungkiri hal tersebut juga dipengaruhi oleh rumitnya birokrasi yang ada seperti yang disampaikan Kepala Dinas Baperlitbang

"pergeseran itu biasanya setelah 1 bulan setelah didok APBD tahun berjalan tahun 2024 anggaran 2024 itu digedog 31 Desember 2023 biasanya TAPD terutama dari sisi keuangan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan

Aset Daerah lantai 2 itu terus kemudian memberitahukan kepada teman-teman mana-mana saja yang mau melakukan pergeseran karena kenapa perlu pergeseran? Kadang-kadang dalam menginput anggaran itu kurang terus kemudian ada aturan yang baru entah itu dari pusat dan lain sebagainya sehingga itu perlu disesuaikan bu dilakukan caranya bagaimana dengan melakukan pergeseran itu Termasuk yang tahun ini kan masuknya untuk tambahan makanan yang ada di dinas kesehatan”

Gow dan Morss juga menyampaikan dalam buku yang sama, keterbatasan sumber daya, baik secara finansial maupun manusia merupakan hambatan besar dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan hambatan yang penulis temui dalam program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kendal. Kepala Dinas P2KBP2PA Kabupaten Kendal menyampaikan:

“Secara bakunya itu sebenarnya ada orientasi ada pelatihan TPK itu istilahnya setahun sekali pelatihan, Itu ya orientasi bu mengingatkan kembali itu ada sejumlah materi yang disampaikan ya mulai dari 1000 HP itu yang di fasilitasi provinsi nah kemudian kami juga punya dari APBD itu kami melakukan secara itu sosialisasi atau penguatan kapasitas itu kita juga lakukan bu paling tidak 4 kali setahun”

Keterbatasan pengetahuan kader posyandu menjadi kendala besar karena mereka lah yang menjadi ujung tombak dalam program-program penurunan stunting namun hal tersebut belum bisa diatasi oleh pihak dinas, pemberian training dan pembekalan pun bisa dilakukan secara berkala dalam satu tahun kader hanya diberi peningkatan kapasitas sebanyak 4 kali, hal serupa juga ditemukan dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan (DINKES) Beliau menyampaikan

“Kalau TOT itu dari Puskesmas sudah ada, kemarin ada pelatihan untuk nanti bagaimana melatih kader di tingkat desa itu kita ke Bappenas, balai pelatihan kesehatan”

Sedangkan dari Dinas Kesehatan hanya melakukan peningkatan kapasitas Kader hanya 1 kali dalam setahun, berdasarkan temuan ini dapat kita cermat kekurangan sumber daya menjadi hambatan besar yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan, pembekalan Kader dari Dinkes hanya dilakukan 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun ini tidaklah cukup untuk membekali kader-kader dengan edukasi yang cukup yang nantinya informasi ini akan disampaikan ke sasaran agar sasaran terbekali dengan pengetahuan tentang stunting namun pada prakteknya di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu stunting temuan ini tidak bisa di jadikan patokan utama karena masyarakat daerah juga masih banyak yang lebih percaya perkataan Dukun Desa, mitos dan tetua Desa.

b. Hambatan Eksternal dalam Penanganan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kendal

Target Prevalensi stunting pada dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2021-2026 menggunakan data e-PPGM hal ini tidak linier dengan target yang ditetapkan pada RPJMN yang menggunakan data survey. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan narasumber yang telah peneliti temui, bahkan semua pihak masih kurang puas dengan data survey yang dilakukan oleh Kemenkes di kabupaten kendal pada tahun 2023, yang menghasilkan kenaikan angka prevalensi stunting sebesar 4,9% dari 17,5% menjadi 22,4% sedangkan sesuai data e-PPGM angka stunting di Kabupaten Kendal pada tahun 2022 hanya sebesar 11,4%. seperti halnya yang dinyatakan Gow dan mors pendekatan kebijakan yang bersifat top-down atau dari atas bawah kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas mungkin tidak sesuai dengan realitas dan tantangan yang dihadapi di tingkat lokal, ketidaksamaan penggunaan target prevalensi angka stunting dari kemenkes dan pemerintah daerah kabupaten kendal memberi kebingungan dalam penetapan kebijakan, dikarenakan target yang tidak jelas akan mengurangi efektifitas suatu program maupun kebijakan

Seperti yang dijelaskan Gow dan mors sumber daya menjadi faktor pendorong tercapai maupun gagal nya sebuah kebijakan, di Kabupaten Kendal sendiri kurang meratanya infrastruktur dianggap menjadi salah satu faktor kenapa kasus stunting di sebagian daerah pravelensinya tinggi hal ini disampaikan oleh Niken DPRD komisi D

“Yang jelas kalau untuk ini aku cerita di Dapil ku ya di wilayah atas ya. Disana memang mereka terkendala pelayanan kesehatan.dimulai dari mimpi ibu hamil ya karena disana tidak tersedia dokter spesialis kandungan sama dokter spesialis anak. Oke. Oke. Kalau Kalau wilayahnya kan jauh kan di sana orang sana wilayah atas itu kalau mau ke dokter spesialis maupun spesialis anak itu harus ke Kabupaten Temanggung”

Pernyataan di atas dapat peneliti tarik kesimpulan salah satu faktor penghambatan implementasi kebijakan stunting di kabupaten kendal adalah pelayanan dan infrastruktur kesehatan yang kurang merata, sampai tahun 2023 rumah sakit - rumah sakit besar dengan fasilitas yang baik hanya dapat ditemui di daerah Kendal bawah tepatnya di beberapa kecamatan(Kaliwungu selatan, Kaliwungu, Brangsong, Kendal, Pegandon, Ngampel, Patebon, Cepiring, Kangkung, Gemuh, Weleri dan Rowosari sedangkan di Daerah Kendal Atas (Kecamatan Singorojo, Boja, Limbangan, Pageruyung, Patean dan sukorejo) belum mempunyai fasilitas kesehatan yang setara dengan Kendal Bawah, selain itu juga peneliti menemukan banyak Posyandu yang belum dilengkapi dengan antropometri (alat pengukur tinggi dan berat balita) hal ini menjadi salah satu penghambat dalam penanganan kasus stunting karena tanpa adanya Data yang akurat akan mengakibatkan penanganan yang berbeda sehingga ini dapat mengakibatkan ketidak tepatan dalam pengambilan kebijakan

Masyarakat daerah juga masih banyak yang lebih percaya perkataan Dukun Desa, mitos dan tetua Desa hal ini juga menjadi kendala di lapangan yang dihadapi para kader ketika mereka mencoba untuk memberikan informasi baru tentang stunting, dari hasil wawancara peneliti dengan Perwakilan DPRD komisi D di Kabupaten kendal beliau menyampaikan

“iya itu tadi kendala nya satu ya memang kulturenya masyarakatnya yang sudah dari dulu terbiasa seperti itu dan memang yang kedua memang wilayah ya”

hal ini selaras dengan pernyataan Gow dan Mors yang menyebutkan sumber daya pada konteks ini sumber daya manusia yang kurang, biasa menjadi salah satu penghambat dalam implementasi Kebijakan, dalam kasus stunting sendiri masyarakat yang jauh dari perkotaan pada prakteknya lebih sulit diberi informasi baru karena kultur budaya yang masih amat kental, mereka masih memegang teguh kepercayaan dan adat-adat yang di turunkan oleh orangtua dahulu, contoh kecilnya ketika secara medis bayi di anjurkan untuk mengkonsumsi ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa memberikan Mpasi pada kenyataannya di daerah-daerah masih banyak yang memberi makan balita di bawah 6 bulan dengan makanan tambahan, kemudian banyak juga orang tua yang melarang ibu-ibu pasca melahirkan mengkonsumsi ikan maupun makanan yang tinggi mineral dan disarankan untuk mengkonsumsi hanya tempe dan tahu, hal-hal seperti itu masih di temui di daerah padahal secara medis semua itu bertolak belakang dengan apa yang disarankan oleh pakar gizi dan para dokter spesialis. peristiwa ini menjadi tantangan tersendiri bagi kader-kader yang turun ke lapangan secara langsung karena hal ini menjadi kendala ketika para kader mencoba memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Ada juga temuan dari hasil wawancara peneliti dengan NGO

“Kayak-kayak. Ini pasti ada yang something wrong nih, apa. Saya gali-gali, apa? Diencerkan, pas kelihatan sambil nunggu kan dia bikin. bu itu berapa? Bener-bener airnya penuh, 250 mili. Tapi cuma 2 sendok. Kemarin ada kalau di sini pakai dancow, anaknya udah 4 tahun. Tetep gak naik-naik. Banyak kejadian, takaran, takaran sesuai. Diencerkan, takaran. Jadi setengah. Yang penting kelihatan”

Dari hal itu, NGO menyampaikan masih banyak orang tua yang belum paham bagaimana cara yang benar untuk menyajikan Susu Formula sehingga berakibat pada kurang maksimal gizi yang dibutuhkan oleh balita selain ketidak tahunan juga faktor ekonomi menjadi kendala dan alasan mengapa banyak orangtua yang mengencerkan atau mengurangi takaran susu formula agar hemat.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya stunting ini juga diperkuat dengan kesadaran orang tua balita yang enggan mendatangi Posyandu di daerahnya. Hal ini tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mengenai capaian pengukuran balita di posyandu.

“Jumlah sasaran semua balita, 62.072 balita, sementara yang sudah dilakukan pengukuran untuk mengetahui dia stunting atau tidak itu ada 53.556 anak. (sisanya tidak dilakukan pengukuran karena) Tidak datang ke posyandu biasanya, jadi yang datang ke posyandu itu kita targetnya perhitungan stunting itu 85% dari yang diukur itu sudah menggambarkan jumlah stunting yang ada. Sudah menggambarkan jumlah stunting yang ada itu apabila yang hadir diukur itu lebih dari 85%.”

Pernyataan informan di atas menunjukkan masih ada 8.516 balita atau sekitar 14% balita yang tidak diajak ke Posyandu oleh orang tuanya. Di lain sisi, target pengukuran balita untuk mengetahui gambaran stunting sudah dapat diketahui pada perhitungan 85% balita yang hadir di Posyandu, sehingga Kader Posyandu ‘merasa’ sudah puas jika ketercapaian penimbangan sudah berada di angka 85%.

c. Hambatan Kebijakan Penanganan Stunting dalam Perspektif Masyarakat

Dalam observasi dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui metode wawancara terhadap masyarakat, sebagian besar masyarakat masih tidak mengerti mengenai stunting dan permasalahannya. Salah satu informan penelitian, Lina (31 tahun), menyampaikan jika masih banyak masyarakat yang tidak paham stunting,

“Ya banyak yang paham, banyak yang engga kemungkinan ya. Katanya juga banyak yang masih tumbuh kembangnya masih kurang. Belum begitu paham tentang MPASI, cara pemberiannya. Kalau menurut aku sih untuk bayi dan balita itu enegga cuma dari asupan makan, tapi dari tidur. Kalau pola tidurnya bagus baik otomatis dia enggak rewel”

Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Posyandu kepada masyarakat perlu ditingkatkan kembali. Masyarakat mengharapkan adanya penyuluhan yang lebih baik dan komprehensif mengenai stunting kepada masyarakat dengan frekuensi yang lebih banyak lagi. Udin (39 Tahun) mengharapkan adanya peningkatan kuantitas penyuluhan mengenai stunting kepada masyarakat.

“Perlu ditekankan lagi penyuluhannya gitu, Bu, biar angka stunting turun, gitu, Bu.”

Banyak kader posyandu yang kurang humanis kepada masyarakat, contoh ketika seorang ibu membawa 2 anaknya, namun hanya salah satu saja yang perlu divaksin. Seorang anak yang tidak divaksin juga tetap ingin mendapatkan kudapan dari Posyandu, namun karena cara menolak atau mengatakan tidak seorang kader yang kurang pas sehingga menyinggung ibu tersebut. Alhasil ibu tersebut sudah tidak pernah ke Posyandu lagi sejak saat itu.

“tadinya rajin, tapi sekarang udah engga. Itu ada kader yang rese. Kan aku kalau bawa anak dua gitu kan yang satunya kan caranya ingin jajan, tidak boleh. Aku mau bayar tidanya tidak boleh. Caranya mau bayar jajanan, yang kakaknya pengen (jajan di posyandu untuk anak yang gede)”

Pemerintah perlu memberikan bantuan lebih terhadap masyarakat khususnya bantuan makanan bergizi langsung untuk anak-anak yang terindikasi kasus stunting.

“Perlu ditekankan lagi itu, Bu. Penyuluhannya gitu, Bu. Biar angka stunting turun. Semoga ditambah bantuan mungkin dari bentuk makanan yang bergizi itu, Bu.”

IV. Penutup

Penelitian ini mengidentifikasi tentang hambatan-hambatan kunci yang mempengaruhi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kendal, dari hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa aktor yang berperan serta dalam pengambilan kebijakan tentang stunting ini di temui bahwa faktor-faktor yang menghambat penurunan stunting di Kabupaten Kendal sangatlah kompleks. Terdapat 2 kelompok besar: internal (Instansi Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan) dan eksternal (Masyarakat, Lingkungan, dan Sosial Budaya), yang ditemukan tidak memiliki koordinasi yang sistematis, juga lintas sektoral yang cenderung bekerja sendiri-sendiri menjadi salah satu hambatan yang masih menjadi faktor kunci dalam percepatan penurunan kasus stunting di Kabupaten Kendal, kemudian keterbatasan pengetahuan kader-kader posyandu dan kurangnya inovasi dan program yang terfokus untuk penurunan kasus stunting masih sangat minim, Sedangkan faktor eksternal dari masyarakat masih sangat minim pengetahuan tentang stunting bahkan beberapa masyarakat sama sekali tidak mengetahui tentang apa sebenarnya penyebab stunting itu, selain itu kurangnya infrastruktur kesehatan juga menjadi salah satu faktor kunci hambatan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kendal, penelitian ini bertujuan memberikan sebuah pedoman dan atau pegangan kepada para pemangku pelaksana dan pembuat kebijakan agar lebih kritis pada saat pembuatan

kebijakan tentang stunting terutama di Kabupaten Kendal. Peneliti berharap dengan adanya tulisan ini mampu memberikan sebuah sudut pandang yang lain bagi para peneliti bahwa persoalan implementasi kebijakan penurunan angka stunting tidak melulu hanya seputar makan makanan dengan gizi seimbang, kebersihan lingkungan, pola asuh keluarga, namun perlu ada dorongan dan campur tangan yang serius dari pemerintah dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah harus mampu mengintervensi dan memiliki kebijakan yang menasar langsung kepada balita dengan indikasi stunting, dengan membuat sebuah produk kebijakan yang mewajibkan para kader beserta jajarannya yang bersentuhan langsung kepada keluarga atau masyarakat di lapangan. Pemerintah harus memiliki *key performance indicator* kesuksesan dan kegagalan kebijakan intervensi kasus stunting yang jelas, sama, dan merata di setiap daerah di seluruh Indonesia.

Daftar Pustaka

- De Onis M, Blossher M, Borghi E (2012). "Prevalence and trends of Stunting Among Preschool Children, 1990-2020". *Public Health Nutrition*, Volume 15:142-148.
- Gow, D., & Morss, J. (1998). *Local Organization and Rural Development: A Learning Approach to Policy and Practice*. University Press.
- Hoffman DJ, Sawaya AL, Verreschi I, Tucker KL, Roberts SB. 2000. "Why are nutritionally stunted children at increased risk of obesity? Studies of metabolic rate and fat oxidation in shantytown children from São Paulo, Brazil". *Am J Clin Nutrition* Volume 72:702-7.
- Kemkes RI. 2018. *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. *Buletin Jendela Duta dan Informasi Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Lewit E M, Kerrebrock N. 1997. "Population-Based Growth Stunting". *The Future Of Children Children And Poverty*. Volume 7 No. 2.
- Pemerintah Kabupaten Kendal. 2023. "Pemkab Kendal Raih Penghargaan 'Petik Aksi'. Dalam https://kendalkab.go.id/berita/id/20231222004/pemkab_kendal_raih_penghargaan_petik_aksi#:~:text=Kendal%20%2D%20Pemerintah%20Kabupaten%20Kendal%20berhasil,Poster%20Competition%20Audit%20Kasus%20Stunting.
- Picauly I, Magdalena S. 2013. "Analisis determinan dan pengaruh stunting terhadap prestasi belajar anak sekolah di Kupang dan Sumba Timur, NTT". *Jurnal Gizi dan Pangan*, Volume 8 No. 1: 55-62.
- Riyadi, H., Martianto, D., Hastuti, D.m Damayanthi, E., Murti Laksono, K. 2011. "Faktor-faktor yang Memengaruhi Status Gizi Anak Balita di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Gizi Pangan*, Volume 6 No.1: 66-73.
- Sabatier, Paul A., Weible, Christopher M. 2017. *Theories of the Policy Process*. Boulder: Westview Press.
- Taufiqurrahman, Hadi H, Julia M, Herman S. 2009. "Defisiensi Vitamin A dan Zinc Sebagai Faktor Risiko Terjadinya Stunting Pada Balita Di NTT". *Media Peneliti dan Pengembangan Kesehatan*. Volumen XIX: 84 - 94.
- Unicef, 2013, Improving Child nutrition the achievable imperative for global progress, Diakses: WWW.Unicef.Org/media/files/nutrition_report_2013.pdf. Tanggal 24 Desember 2013.
- Walker SP, Chang SM, Powell CA, Simonoff E, McGregor SM. tt. "Early Childhood Stunting Is Associated with Poor Psychological Functioning in Late Adolescence and Effects Are Reduced by Psychosocial Stimulation". *Journal Nutrition*. Volume 137: 2464-2469.
- World Health Organization. 2013. *Global nutrition Policy Review: What does it take to scale up nutrition action*. Geneva, Switzerland: WHO Press.